

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai konversi penggunaan lahan yang disebabkan oleh prasarana dan sarana jalan (studi kasus jalan Soekarno Hatta Bandung ruas jalan Buah Batu –Kiaracandong), yaitu :

1. Lahan pertanian yang dikonversikan menjadi lahan di koridor jalan Soekarno Hatta merupakan kelas lahan S1 artinya lahan tersebut tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaannya secara berkelanjutan atau hanya ada faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktifitasnya secara nyata.
2. Jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung memicu perubahan penggunaan lahan di koridor Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung, yang awalnya adalah lahan pertanian dengan kemampuan lahan kelas I sampai dengan V berubah menjadi permukiman dan semakin intensif berubah menjadi perkantoran dan perdagangan terutama di ruas-ruas jalan yang memiliki akses masuk ke pusat kota dan ke luar kota. Perubahan penggunaan lahan yang diakibatkan oleh semakin banyaknya kendaraan yang melintas berdampak pula terhadap kualitas air sungai yang melewati Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung.
3. Pola jaringan jalan Soekarno Hatta berbentuk tulang daun dan menyebabkan daerah-daerah di sisi jalan Soekarno Hatta menjadi ruang yang memiliki fungsi strategis untuk diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti: perdagangan, industri dan prasarana angkutan umum.

4. Lapangan pekerjaan di Kota Bandung yang terbesar menyerap tenaga kerja adalah swasta yaitu sekitar 35.37 %. diikuti oleh lapangan pekerjaan pedagang, pegawai negeri, TNI/POLRI, dan yang terkecil adalah lapangan pekerjaan petani menyerap sekitar 6.34 % pada periode tahun 1989/2003. Karakteristik penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung menunjukkan bahwa kegiatan pertanian di Kota Bandung pada periode tahun 1989/2003 telah terpinggirkan karena semakin berkurangnya lahan-lahan pertanian di Kota Bandung serta telah dialihfungsikan menjadi kegiatan perdagangan dan permukiman. Alih fungsi lahan pertanian di Kota Bandung menjadi permukiman tentunya mengubah lingkungan dan ekosistem Kota Bandung yang sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya.
5. Analisis kemampuan lahan diarahkan untuk mengetahui potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan lestari berdasarkan cara penggunaan dan perlakuan yang paling sesuai sehingga dapat dijamin pemanfaatan lahan dalam waktu yang tidak terbatas.
6. Hasil pengukuran kualitas udara pada periode tahun 2001/2003 menunjukkan parameter-parameter kebisingan (*noise*), HC (hidrokarbon), SPM (*suspended particulate matter*) dan O₃ (oksidan) melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Hasil pengukuran parameter CO menunjukkan nilai terbesar di Jalan Buah Batu (7.898 ppm/8 jam) yang bermakna terjadinya kemacetan kendaraan di Jalan Buah Batu dibandingkan di lokasi-lokasi lain di Jalan Soekarno-Hatta karena penggunaan lahan perkantoran dan perdagangan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian konversi penggunaan lahan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana jalan adalah :

1. Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung selayaknya lebih berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan pembangunan dan menata wilayah di tataran Bandung agar daya dukung wilayah tataran Bandung mencapai kondisi keseimbangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Analisis kemampuan lahan dan kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Tata ruang yang telah memperhitungkan kemampuan dan kesesuaian lahan menjadi acuan para pelaksana pembangunan selayaknya ditaati dan dilakukan secara koordinatif oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pada perencanaan –perencanaan infrastruktur juga pembangunan jalan sepatutnya melakukan perencanaan dari bawah ke atas yang gagasannya lahir dari kebutuhan masyarakat dan diwujudkan program pembangunan oleh Pemerintah.
3. Pemerintah kota Bandung sepatutnya transparan dalam kegiatan pembangunan, juga dalam pembangunan jalan, agar berbagai penyimpangan akibat dari pembangunan jalan dapat dipantau oleh masyarakat sehingga antisipasi dini dapat dilakukan untuk menghindari berbagai masalah yang mungkin terjadi akibat adanya penyimpangan dalam pembangunan jalan.
4. Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung harus lebih memperhatikan rasio komponen jaringan jalan terhadap luas wilayah, teknologi pembangunan jalan

dan jembatan yang mempertimbangkan komponen lokal dan kemajuan teknologi, pengembangan sistem angkutan massal dan kondisi populasi.

5. Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sebaiknya lebih tegas dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat, agar tidak terjadi pelanggaran dalam konversi lahan baik dalam pembangunan jalan maupun dalam pengembangan daerah di sekitar jalan, untuk menghindari konflik sosial di masyarakat.
6. Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Perhubungan seharusnya lebih produktif dalam mengembangkan sistem transportasi umum, baik dalam kuantitas maupun kualitas layanan yang diberikan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan.
7. Untuk Jurusan, sebaiknya dalam pembuatan rekomendasi dan surat-surat perizinan dilakukan lebih cepat dalam upaya cepatnya proses penyelesaian pekerjaan dan hubungan birokrasinya diperbaiki lagi.

